

STRATEGI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI BUMDES PROGRAM PASAR DESA

Aprianus Jepri

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: aprianusjepri755@gmail.com

Abstrak: BUMDes merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di pedesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini membuat banyak desa yang membangun dan mengembangkan BUMDes dengan program yang beragam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, namun pada pelaksanaannya masih banyak BUMDes yang belum berkembang dengan baik, penyebab utamanya adalah belum dikelolanya BUMDes secara profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BUMDes dalam mengelola pasar desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang serta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Analisis data dilakukan melalui metode pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan dalam pengelolaan pasar desa Landungsari dilakukan dengan cara pengelolaan pasar desa diarahkan pada sistem pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian di desa. Langkah-langkah yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas dipasar bagi masyarakat untuk berjualan. Bagi masyarakat desa Landungsari yang akan menggunakan fasilitas di pasar untuk berjualan harus menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat dan membayar sewa dengan persyaratan berupa KTP dan KK. Kendala-kendala dalam pelaksanaannya yaitu dalam hal kepengurusannya yang masih kurang lengkap sesuai dengan kebutuhan kerja.

Kata Kunci: Strategi, Kesejahteraan, Kemandirian Ekonomi, Pasar Desa

Abstract: BUMDes is one of the programs issued by the Government in the effort to develop and improve the economy in the countryside according to the potential owned. This makes many villages build and develop BUMDes with diverse programs. The goal is to develop and improve the economy of the village community, but the implementation of BUMDes is still not well developed, the main cause is not yet managed by BUMDes professionally. This research aims to know the strategy of BUMDes in managing the market village Landungsari Dau District Malang and supporting and inhibiting factors. The study used qualitative research with methods of data collection using the Snowball Sampling technique. Data analysis is done through data collection methods, data presentation, and withdrawal of conclusions. The results of this study indicated that the strategy conducted in the management of Landungsari Village Market is carried out by the management of the village market directed at the traditional market system that became the economic center in the village. The steps are the provision of the market facilities for the community to sell. For people of Landungsari who will use facilities in Pasar to sell must sign a letter of agreement that has been made and pay the lease with the terms of the form of KTP and KK. The obstacles in the implementation are in terms of its lack of complete treatment according to the needs of work.

Keywords: Strategy, welfare, economic independence, Village market

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang sehingga, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menuju kemandirian dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Titik berat pembangunan nasional berada pada bidang ekonomi, bidang ekonomi menjadi penggerak utama pembangunan dengan diiringi oleh kualitas

sumberdaya manusia yang memadai. Melihat titik tolak pembangunan nasional yang berada dibidang ekonomi tersebut maka pemerintah dengan rakyat memiliki kewajiban untuk terus menggali, mengelola dan membina potensi yang dimiliki seperti mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah dibreikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengelola sendiri kepentingan rumah tangganya. Kewenangan tersebut didasarkan pada otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Revormasi dan otonomi daerah adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam upaya membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, menjadi suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa sesuai dengan sumber daya yang dimiliki baik berupa sumber daya alam ataupun yang berupa sumber daya manusia. Pemerintah desa dalam menjalankan otonomi, harus melibatkan peran serta masyarakat untuk turut terlibat langsung dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan karena pemerintah desa berhadapan langsung dengan masyarakat. Desa adalah bagian paling depan atau agen pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan otonomi desa dan mendorong perekonomian dipedesaan tersebut, maka salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan BUMDes, maka akan mendorong kuatnya ekonomi desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa. Tujuan didirikannya BUMDes, tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes dibentuk dan dibangun oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada pengolaan potensi desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa didasari atas otonomi daerah dengan yaitu adanya Peraturan desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah. BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Pendirian dan pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes disasari pada prinsip kooperatif partisipatif dan transparansi. Peinsip pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa sehingga BUMDes pada operasionalnya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan). Jika lembaga ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada masyarakat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi dipedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi dipedesaan.

Pada beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat. Pada saat ini masih belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik, penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-Undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus disadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengurus BUMDes. Sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan penguatan ekonomi perdesaan melalui

BUMDes, maka pemerintah Kabupaten Malang membuat Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2006 tentang BUMDes dan Peraturan Daerah nomor 1 Pasal 234 Tahun 2016 tentang Desa. Kepala DPMD Kabupaten Malang Suwadji (radarmalang.id 14/03/2018), mendorong agar semua desa membentuk BUMDes, yaitu mendorong 378 desa lebih mandiri.

Pada Kabupaten Malang telah ada 100 BUMDes, terdiri dari 71 BUMDes mandiri bentukan satu, 2 BUMDes bersama milik beberapa desa, dan ada 27 BUMDes bersama eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri. Pemerintah desa yang sudah membentuk BUMDes akan mendapat suntikan bantuan. Pada tahun 2017, 28 BUMDes di Kabupaten Malang telah menerima bantuan, totalnya Rp 190 juta berasal dari Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat. Dari sejumlah desa di Kabupaten Malang yang telah memiliki BUMDes, Desa Landungsari merupakan salah satu desa yang sudah Memiliki BUMDes, yaitu termuat dalam Peraturan Desa Landungsari nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan pasar desa Landungsari, pasal 2 Poin 1, yaitu pemerintah desa menyelenggarakan pasar desa yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan atas latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui BUMDes Program Pasar Desa” yang akan dilaksanakan pada BUMDes di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Tujuan nya yaitu untuk mengetahui strategi-strategi yang dilakukan BUMDes Landungsari dalam pengelolaan pasar desa Landungsari dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, atau metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada waktu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, Moleong (2014: 6). Lokasi penelitian dilakukan pada BUMDes di desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada strategi BUMDes dalam mengelola pasar desa Landungsari dengan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penentuan informan yang dilakukan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang meliputi Kepala Desa Landungsari Bapak Saipul Imam., S.Ag, ketua pengelola pasar desa Landungsari Bapak Mfarrih HR., S.HI, bidang retribusi pasar Bapak Trianjar, bendahara pengelola pasar desa Landungsari Ibu Yeni Erniati., SE.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif dan dilakukan dengan terus menerus dengan langkah-langkah yang dilakukan yaitu pengumpulan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu data yang diperoleh dari hasil analisis data diuji keabsahannya berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan peneliti tetap sebagai instrumen utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi BUMDes Dalam Mengelola Program Pasar Desa Landungsari

Strategi merupakan sebuah langkah tindakan yang dilakukan individu, kelompok maupun suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan dengan memperhatikan langkah-langkah seperti menentukan

tujuan dan sasaran jangka panjang dengan pemilihan tindakan serta pengalokasian sumber daya yang didapatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menentukan dan memilih strategi yang akan digunakan, sehingga apabila dijalankan dengan baik maka akan memberikan hasil yang maksimal. Pemerintah desa Landungsari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan suatu kemandirian ekonomi di desa membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan sebagai jembatan bagi masyarakat desa dalam mengembangkan perekonomian sehingga akan terwujudnya suatu kemandirian ekonomi di desa. BUMDes sebagai jembatan bagi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian tentu memiliki suatu program kerja sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian. Program yang dilakukan BUMDes di desa Landungsari yaitu Pengelolaan pasar desa. Pengelolaan pasar desa Landungsari telah diatur dalam Peraturan Desa Landungsari nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan pasar desa Landungsari pasal 2 poin 1 yaitu “pemerintah desa menyelenggarakan pasar yang dibangun serta dikelola oleh pemerintah desa dan atau BUMDes”. Dalam pengelolaan pasar desa Landungsari agar dapat berjalan dengan maksimal tentu membutuhkan strategi-strategi yang tepat sehingga dapat mencapai sasaran serta tujuan yang akan dicapai.

Sebelum membahas tentang hasil penelitian strategi BUMDes dalam mengelola program pasar desa Landungsari, peneliti akan terlebih dahulu mengulas peneliti terdahulu. Pertama penelitian Andriani Sari (2017) dengan judul Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa BUMDes di Kecamatan Perbaungan merupakan lembaga yang modal usahanya dari pemerintah desa yaitu 100% dana desa yang ada berasal dari APBN sebesar Rp 2.978.650.000. Keuntungan yang diperoleh BUMDes di Kecamatan Perbaungan dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan anggota berdasarkan peraturan yang telah disusun serta pengelolaan BUMDes sudah dikelola dengan baik. Berdasarkan penyerapan tenaga dengan adanya BUMDes di Kecamatan Perbaungan sekitar 17991 jiwa dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp 2000.000 sebelum adanya BUMDes, sedangkan pendapatan rata-rata sesudah adanya BUMDes sebesar Rp 2.7000.000 berarti keuntungan yang dihasilkan sebesar 0,7%, berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes sangat berperan bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Perbaungan, dan sudah sesuai dengan tujuan BUMDes yaitu lembaga yang menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terwujud pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ovi Era Tama (2013) dengan judul “Dampak BUMDes Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Dampak BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul khususnya dibidang ekonomi, kesehatan dan pembangunan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa BUMDes Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun masih ada kendala-kendala dalam hal unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan. Hal ini dapat diketahui dari perbandingan sebelum dan sesudah adanya Badan Usaha Milik Desa, yaitu sebelum adanya BUMDes tingkat kemiskinan di Desa Karangrejek mencapai 68% pada tahun 1993 sehingga menjadikan Desa Karangrejek ditetapkan sebagai desa IDT. Setelah adanya kebijakan BUMDes dan diterapkan di Desa Karangrejek, kondisi masyarakat mulai ada perubahan.

Kemudian Penelitian Penelitian Fitriksa (2017) yang Berjudul “Strategi Pengembangan BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan

Bintan Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Disamping itu kontribusi dari masyarakat dalam mendukung program BUMDes di desa Lancang Kuning ini juga masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan program yang dijalankan BUMDes yang ada di Desa Lancang Kuning tidak berjalan dengan maksimal. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian strategi BUMDes dalam mengelola program pasar desa Landungsari sesuai dengan proses manajemen strategi Riva'i dalam Yunus (2016: 14):

1. Perumusan Strategi (*Formulating Strategi*)

Perumusan strategi berkaitan dengan mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan menetapkan tujuan jangka panjang serta merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Dengan demikian proses penerapan strategi merupakan bagian yang paling penting dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya dalam penerapan strategi yang dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.

perumusan strategi yang dilakukan BUMDes Landungsari yaitu dengan terlebih dahulu menganalisa peluang-peluang maupun potensi-potensi yang dimiliki. hal ini dilakukan melalui musyawarah lembaga pemerintah desa beserta tokoh masyarakat dan lembaga BPD. Selanjutnya memutuskan untuk membuat suatu program untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut yang hasilnya yaitu pengelolaan pasar desa. Strategi dalam perumusan pengelolaan pasar desa yaitu membentuk dan menjadikan pasar sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dengan cara penyediaan fasilitas untuk berdagang atau berjualan berupa bedak dan los yang akan di kontrakan dalam jangka waktu tertentu bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tentang pasar desa telah diatur dalam Peraturan Desa Landungsari No 4 tahun 2010. Tujuan dari pasar desa ini yaitu sebagai pusat perekonomian masyarakat di desa Landungsari dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat desa.

2. Penerapan Strategi (*Implementing Strategi*)

Penerapan strategi berkenaan dengan menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengembangkan budaya yang mendukung strategi, dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi serta mengembangkan budaya yang mendukung strategi. Dalam hal ini BUMDes Landungsari sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi merupakan bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka BUMDes bersama lembaga desa, tokoh masyarakat dan DPD serta didukung dari partisipasi masyarakat Landungsari membangun pasar yang menjadi pusat perekonomian di desa.

Pada proses penerapan strategi pengelolaan pasar desa Landungsari diarahkan pada sektor pasar tradisional dengan membantuk manajemen pengelolaan unit pasar yang terdiri dari ketua pengelola unit pasar, bendahara, bidang retribusi pasar, bidang keamanan dan bidang kebersihan pasar. Tujuan pengelolaan pasar pada sektor pasar tradisional sesuai dengan potensi serta peluang yang dimiliki yaitu keberadaan para petani sayur, para pedagang makanan dan keberadaan anak kos serta warga masyarakat lainnya sebagai konsumen sehingga dapat memberi kemudahan bagi masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan serta terciptanya peluang bagi masyarakat untuk

dapat meningkatkan perekonomian sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Sementara itu sasaran pedagang yang menjadi prioritas utama untuk berjualan di pasar yaitu masyarakat desa Landungsari itu sendiri. Berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam pengeloan pasar desa tersebut didapatkan dari hasil pembayaran sewa maupun pembayaran kontrak dari para pedagang yang akan berjualan di pasar.

3. Pengevaluasian

Pengevaluasian merupakan suatu proses untuk menilai maupun untuk menguji konsekuensi dari suatu program yang telah dijalankan. Dalam pengelolaan BUMDes Landungsari agar dapat berjalan secara efektif membutuhkan dukungan dari semua pihak baik tokoh masyarakat, lembaga pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat. Sebagai lembaga usaha di desa BUMDes, menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian sehingga semua program yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Untuk itu dalam pengelolaan BUMDes tersebut sangat perlu adanya pengevaluasian hal ini bertujuan untuk menilai apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan ketapan yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan BUMDes program pasar desa Landungsari masih belum berjalan dengan maksimal karena permasalahan yang terjadi dalam kepengurusannya. Walaupun dalam pengelolaan BUMDes program pasar desa ini masih mengalami hambatan, namun program yang ditetapkan masih bisa terlaksana hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa Landungsari memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengevaluasian program pasar desa yang dilaksanakan oleh BUMDes Landungsari dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan cara melakukan kordinasi kepada pengurus-pengurus yang ada untuk menampung semua aspirasi sehingga dapat diketahui apakah program-program yang ada berjalan dengan baik maupun mengalami hambatan, langkah selanjutnya dilakuakan musyawarah bersama dengan lembaga pemeritah desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengevaluasi dan menentukan langkah terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga pengelolaan pasar desa landungsari tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan BUMDes Program Pasar Desa Landungsari

1. Faktor Pendukung

Untuk mewujudkan setiap program maupun kebijakan yang telah ditentukan memerlukan pemaksimalan dari semua komponen pelaksana serta koordinasi dan kerjasama antara semua pihak terkait. Untuk itu dalam pengelolaannya membutuhkan strategi-strategi yang tepat sehingga dapat mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditentukan. Pembentukan BUMDes di desa Landungsari bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes program pasar desa Landungsari tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung sehingga program-program yang telah ditentukan dapat terlaksana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat diketahui bahwa terbentuknya pasar desa Landungsari didasari atas keinginan dan partisipasi masyarakat desa atas tuntutan dari kebutuhan masyarakat desa, serta tersedianya peluang sumberdaya seperti pasar desa dan dengan didukung dari anggaran dana desa sebagai modal awal. Dalam pengelolaan pasar desa strategi yang dilakukan yaitu dengan membentuk struktur organisasi dalam beberapa bidang yaitu ketua pelaksana unit progam pasar desa, bendahara, bidang retribusi pasar, bidang keamanan pasar, dan bidang kebersihan pasar. Sementara itu dalam sistem pengelolaan pasar desa yaitu strategi yang dilakukan seperti menyediakan jasa penyewaan dan kontrak tempat usaha bagi para pedagang sehingga mampu menciptakan peluang kerja dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Dari pembahasan tersebut

dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan pasar desa Landungsari yaitu adanya partisipasi dari masyarakat serta tersedianya peluang dan sumberdaya dengan didukung oleh adanya anggaran dana desa sebagai modal awal.

2. Faktor Penghambat

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes di desa Landungsari merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah desa dan masyarakat di desa Landungsari untuk terus berupaya mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki, ini dapat dilihat dengan dibentuknya program pasar desa Landungsari. Tujuan pembentukan BUMDes program pasar desa Landungsari yaitu sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian dalam upaya mewujudkan kemakmuran. Untuk mewujudkan program maupun kebijakan yang telah ditentukan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan memerlukan pemaksimalan dari semua komponen pelaksana serta koordinasi dan kerjasama antar semua pihak terkait. Untuk itu dalam pengelolaannya membutuhkan strategi-strategi yang tepat sehingga dapat mencapai sasaran serta tujuan yang ditentukan. Dalam perkembangan pengelolaan BUMDes di desa Landungsari belum serta-merta berjalan seperti yang diharapkan hal ini karena adanya hambatan-hambatan yang terjadi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes program Pasar desa di Landungsari adalah dalam hal kepengurusan BUMDes masih kurang maksimal dan masih kurang lengkap sesuai dengan kebutuhan kerja. Hal ini dapat diketahui dari beberapa bidang kerja masih saling hendel. Sementara itu kendala dalam sistem unit pasar yaitu dalam hal penertiban pedagang untuk melaksanakan kewajiban membayar sewa tempat untuk berjualan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes program pasar desa masih belum maksimal. Namun meskipun dalam penngelolaannya mengalami hambatan-hambatan, program kerja yang telah ditentukan tetap dapat terlaksana, hal inilah yang menjadi kelebihan dari BUMDes program pasar desa yang ada di Landungsari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui BUMDes Program Pasar Desa di desa Landungsari dapat disimpulkan bahwa:

Program pasar desa di desa Landungsari telah dilaksanakan dan diatur dalam Peraturan Desa Landungsari nomor 4 tahun 2010 tentang pengelolaan pasar desa Landungsari. Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan program pasar desa Landungsari melalui tiga proses yaitu yang pertama proses perumusan strategi, pada proses ini strategi yang dilakukan yaitu melakukan analisa terhadap peluang-peluang yang dimiliki sehingga dapat menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai melalui musyawarah lembaga pemerintah desa, tokoh masyarakat dan lembaga BPD dan hasilnya yaitu penyediaan fasilitas berupa bedak dan los-los yang akan dikontrak bagi para pedagang yang akan berjualan di pasar khususnya masyarakat desa Landungsari. Proses yang kedua penerapan strategi, dalam proses ini strategi pengelolaan program pasar desa Landungsari diarahkan pada sektor pasar tradisional hal ini dilakukan sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki dengan cara membentuk manajemen pengelolaan unit pasar yang terdiri dari ketua unit pasar, bendahara, bidang retribusi pasar, bidang keamanan, dan bidaang kebersihan pasar. Proses yang ketiga yaitu pengevaluasian dari hasil penelitian strategi dalam pengevaluasian program pasar desa Landungsari dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan cara melakukan kordinasi dengan setiap pengurus yang ada untuk menampung semua aspirasi melalui musyawarah bersama dengan lembaga pemerintah desa untuk melakukan evaluasi supaya lebih efektif dan program yang dijalankan tetap sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan BUMDes program pasar desa Landungsari

adalah sebagai berikut: yang pertama faktor pendukung dalam pengelolaan program pasar desa Landungsari yaitu adanya partisipasi dari masyarakat desa Landungsari dan tersedianya sumber daya seperti pasar desa serta dorongan maupun dukungan dari pemerintah kabupaten Malang. Kedua Faktor penghambat pengelolaan program pasar desa Landungsari adalah dalam hal kepengurusan program kerja masih belum maksimal dan masih kurang lengkap sesuai dengan kebutuhan kerja. Kendala selanjutnya yaitu dalam hal penertiban pedagang untuk melaksanakan kewajiban membayar kontrak maupun sewa lapak untuk berjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriska, Kateria. 2017. “*Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara*”. (Online)[http://webcache.Googleusercontent.com/search?q=cache:X5HpsFyn5DoJ:Jurnal.Umrah.ac.id/wpcontent/uploads/ravityforms1c61c9cb232a03a96d09478e525e/2017/08/jurnalkateriafitriska.docx+&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X5HpsFyn5DoJ:Jurnal.Umrah.ac.id/wpcontent/uploads/ravityforms1c61c9cb232a03a96d09478e525e/2017/08/jurnalkateriafitriska.docx+&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id). Diakses Pada 30/05/2018. Pukul 22:20 Wib
- Haboddin, Muhtar. 2015. “*Pengantar Ilmu Pemerintahan*”. UB Perss: Malang.
- Moleong, Lexy J. 2014. “*Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*”. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Sari, Andriani. 2017. “*Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*”. (Online)<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2264/130501032.pdf?sequence1&isAllowed=y>. Diakses Pada 28/05/2018. Pukul 14:30 Wib.
- Solekhan. 2014. “*Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Masyarakat*”. Setara Perss: Malang
- Sugiyono. 2017. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Alfabeta: Bandung.
- Tama, Era. 2013. “*Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Perbaungan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*”. (Online)<http://eprints.uny.ac.id/21714/6/6.BAB%20IV.pdf>. Diakses Pada 28/05/2018. Pukul 16:46 Wib.
- Yunus, Eddy. 2016. “*Manajemen Strategis*”. CV Adi Offset: Yogyakarta.